

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perbincangan mengenai sistem politik dalam Islam, ternyata selalu menarik untuk dikaji sepanjang sejarah ketatanegaraan kaum muslimin. Sementara disisi lain, Islam sebagai suatu sistem ritual dan sistem kehidupan manusia yang integratif diantara kehidupan duniawi dan ukhrawi, ternyata selalu muncul ditengah-tengah pencarian konsep tata-tatanan pemerintahan atau bernegara.¹ Karena itu, Islam bukan hanya sekedar hubungan antar manusia dengan Tuhan-Nya, tanpa ada hubungan dengan masalah penataan kehidupan masyarakat dan persoalan politik.²

Dari segi teori, politik itu sendiri adalah pengetahuan yang penting dan bergengsi, dan dari segi praktiknya; adalah suatu profesi yang terhormat dan bermanfaat. Sebab, politik berkaitan dengan hal penataan persoalan manusia sebaik mungkin.³

Imam Ibnu Qayyim dari Imam Abi Wafa' bin Aqil al-Hambali mengatakan bahwa "politik adalah tindakan yang mendekati kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, selama tidak berlawanan dengan syariat. Politik yang tidak adil akan berlawanan dengan kemauan syariat, tetapi serasi dengan berbagai

¹Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), h. 13.

²*Suara Hidayatullah*, Edisi 10/Tahun XI, Februari, 1999, h. 18.

³Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*, Terj. Odie al-Faeda, (Solo: Media Insani, 2003), h.16..

ketentuannya. Bahkan politik merupakan bagian darinya. Kamu menamakannya “politik” hanya menuruti istilah kalian, padahal politik pada dasarnya adalah keadilan Allah dan Rasul-Nya.⁴

Salah seorang ulama masa lalu yaitu Imam Al-Ghazali memuji nilai dan keutamaan politik, dengan mengatakan: “dunia itu adalah ladang akhirat, agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Penguasa dan agama adalah kembaran, karena agama merupakan tiang dan penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak punya tiang akan roboh dan sesuatu tidak dijaga akan hilang”.⁵

Atas dasar itu pula, secara politik manusia sering disebut sebagai makhluk yang suka berpolitik (*zoon politicon* atau *homo politicus*). Karena itu, persoalan politik adalah ibarat sebuah produk yang lahir begitu saja seiring dengan arus kompetensi kehidupan manusia. Politik juga bisa disebut sebagai “cara yang memang harus lahir sebagai media manusia untuk merengkuh harapan”.⁶ Seiring itu pula juga dengan tugas berat diberikan kepada para pemegang pemerintahan adalah agar terjaminnya kemaslahatan rakyat, bertanggung jawab, bersikap adil dan jujur. Hal ini sebagaimana dipahami dari hadis berikut :

⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, terj. Syarif Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 121.

⁵Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), Jlid 1, h. 17.

⁶Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, terj. Mulid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. v.

عن معقل احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الا لم يجد رائحة الجنة. (رواه البخارى).⁷

Artinya: Dari Ma'qil ra. katanya: saya akan menceritakan kepada engkau hadis yang saya dengar dari Rasulullah Saw. dan saya telah mendengar beliau bersabda: “seorang yang telah ditugaskan Tuhan mematuhi (mengatur urusan) rakyat, kalau dia tidak memimpin rakyatnya itu dengan jujur, niscaya dia tidak akan memperoleh bau surga”. (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa, politik/pemerintahan punya peranan penting dan vital yaitu bagi kokohnya sebuah tatanan kemasyarakatan. Tanpa adanya perpolitikan dan pemerintahan, segala urusan masyarakat tidak akan teratur dan terlaksana dengan baik.

Disisi lain, perdebatan tentang konsep pemerintahan suatu negara belum tuntas sampai sekarang dan masih hangat didalam kancah pemikiran komunitas masyarakat Islam. Bahkan lebih dari itu, di kancah pemikiran politik Islam, pada umumnya masalah politik merupakan produk “perdebatan besar”.

Dikalangan pakar-pakar politik Islam (pemikir politik Islam), seperti Sayyid Quthub, Muhammad Rasyid Ridha dan yang paling vokal adalah Abul A'la al-Maududi berpandangan bahwa Islam bukanlah semata-mata hanya agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut masalah hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek bidang kehidupan manusia

⁷Abu Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Jilid IV, h. 145.

termasuk juga membahas persoalan bidang politik dan pemerintahan (bernegara), serta sumber kekuasaan adalah berasal dari Tuhan.⁸

Sebaliknya, tokoh lainnya seperti Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein berpendapat: Islam hanyalah sebuah agama dan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan negara (pemerintahan). Islam adalah agama yang tidak memiliki sistem politik atau negara Islam adalah risalah rohani semata. Muhammad Saw. tidak bermaksud mendirikan politik dan negara, sebab bukan termasuk bagian dari risalahnya. Beliau hanyalah sebagai seorang Rasul yang hanya bertugas melaksanakan dakwah secara sempurna atau murni, tidak dicampuri dengan kecenderungan terhadap kekuasaan dan seruan mendirikan negara, karena memang beliau tidak memiliki kekuasaan politik dan pemerintahan.⁹

Pakar Islam lainnya, yaitu Muhammad Husein Haikal menolak kedua pendapat tersebut di atas, ia berpendirian bahwa didalam Islam tidak terdapat politik dan sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bangsa. Sementara, Kamal At-Turk di Turki mengemukakan bahwa Islam dan politik bernegara tidak ada hubungannya sama sekali, sehingga sistem yang berlaku di Turki adalah perpolitikan sekuler yang bebas dari aturan-aturan agama.¹⁰

⁸Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 1.

⁹Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1999), h. 29.

¹⁰Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, h.224-226.

Memperhatikan perdebatan yang dikemukakan para pemikir politik dan pemerintahan Islam tersebut, tentunya mereka tidak membahas sedikitpun tentang bagaimana sebenarnya tentang sumber pemerintahan itu berasal dan format menentukannya, serta bagaimana sebenarnya struktur pemerintahan yang tepat dalam suatu negara.

Satu-satunya tokoh atau pemikir politik Islam yang mengangkat persoalan tentang konsep pemerintahan relevan dengan masa kini dan berbeda dengan yang lainnya adalah Fazlur Rahman (1919-1988 M).

Menurutnya bahwa sumber kekuasaan dalam suatu pemerintahan adalah mandat dari rakyat, yaitu dari masyarakat Muslim, bukan mandat dari Tuhan. Untuk mempertegas pendapatnya, maka ia mengutip pidato Abu Bakar saat pembaiatannya sebagai khalifah, yang isinya menegaskan bahwa ia menerima mandat kekuasaan dari rakyat yang memintanya melaksanakan al-Qur'an dan sunnah. Selama ia teguh berpegang kepada keduanya, maka ia hendaknya dipertahankan dan didukung, tetapi jika ia ternyata menyimpang dari keduanya dan berbuat kesalahan, maka ia harus dipecat.¹¹

Negara itu dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum dalam wahyu-Nya. Dengan adanya kesediaan tersebut berarti telah terdapat kesepakatan membentuk suatu komunitas umat muslim yang memberi

¹¹Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: Chicago University Press, 1979), h. 329. Lihat: Fazlur Rahman, "*Konsep Negara Islam*", dalam John J. Donohoe dan John L. Esposito (Penyunting), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), h. 481.

kepercayaan kepada negara untuk mengemban tugas dalam rangka memenuhi keinginan umat. Dengan begitu, teori tentang sumber kekuasaan dalam Islam berasal dari preseden sejarah, yaitu pembentukan negara (Madinah) dan pidato Abu Bakar saat pembaiatannya sebagai khalifah, sebagai tradisi awal Islam yang patut diteladani.¹² Jadi negara Islam menganut kedaulatan rakyat.

Mengenai struktur pemerintahan negara, menurut Fazlur Rahman bahwa kepala negara sebagai fokus sentral dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan "keagamaan". Tapi ia menolak pemegang kekuasaan keagamaan bukanlah seperti kepala negara Islam lalu bertindak seperti paus dalam agama Kristen. Tapi pengawasan dan bimbingan terhadap pengamalan kehidupan beragama dalam masyarakat berada di tangan kepala negara, jika kekuasaan keagamaan ini tidak dijalankan oleh pemerintahan sebuah negara, maka negara tersebut bercirikan sekuler.

Seorang kepala negara menurutnya harus dipilih bebas oleh rakyat, yang kemudian memegang pemerintahan. Dalam hal ini struktur pemerintahan menurutnya terdiri: badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif.¹³

Memperhatikan pemikiran Fazlur Rahman yang dikemukakan tersebut, dapat dipandang sebagai terobosan dalam pemikiran politik Islam, karena lebih maju dari para pemikir sebelumnya yang berkuat tentang konsep negara,

¹²Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: Chicago University Press, 1993), h. 219.

¹³Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, h. 85.

kewajiban kepala negara, ada atau tidaknya konsep negara dalam Islam. Karena itu pemikiran Fazlur Rahman tersebut dengan jelas mengungkap sumber kekuasaan dan struktur kekuasaan pemerintahan yang tepat.

Beranjak dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan ini dari aspek *siyasah Islamiyah*-nya (politiknya), terutama mengenai bagaimana sebenarnya sumber kekuasaan dalam pemerintahan menurut Fazlur Rahman, dan struktur pemerintahan dalam bernegara menurut Fazlur Rahman. Diharapkan akan memperoleh format yang tepat tentang bagaimana pemerintahan yang baik dan benar.

Dari penelitian yang penulis diperoleh, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: "KONSEP PEMERINTAHAN MENURUT PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN".

B. Rumusan Masalah.

Berpedoman pada latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah konsep sumber kekuasaan dalam pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman?
2. Bagaimanakah konsep struktur pemerintahan dalam negara menurut pemikiran Fazlur Rahman?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui konsep sumber kekuasaan dalam pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman.
2. Mengetahui konsep struktur pemerintahan dalam negara menurut pemikiran Fazlur Rahman.

D. Signifikansi Penelitian.

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, maka diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu kesyari'ahan dalam bidang *siyasah Islamiyah*, salah satunya adalah mengenai pemerintahan dalam hal ini menurut konsep pemikiran Fazlur Rahman, sehingga dapat menambah sumbangsih keilmuan dan pemahaman terutama mengenai permasalahan konsep pemerintahan dalam bernegara yang meliputi bagaimana sebenarnya yang sumber kekuasaan, serta struktur pemerintahan negara yang baik dan benar.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Defenisi Operasional.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dalam judul penelitian ini, maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep, ialah ialah rancangan atau buram, rancangan (rencana) tertulis perumusan sementara mengenai suatu peraturan penetapan.¹⁴ Maksudnya suatu rancangan tertulis dalam hal perumusan yang sifatnya sementara terhadap suatu permasalahan yang dikemukakan Fazlur Rahman.
2. Pemerintahan, ialah bagaimana sebenarnya cara mengatur atau memerintah dalam suatu negara.¹⁵
3. *Pemikiran*, ialah cara atau hasil berpikir.¹⁶ Maksudnya ialah hasil dari pemikiran yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman terhadap suatu permasalahan.

Maksud penelitian ini ialah suatu rancangan tertulis dalam bentuk perumusan sementara terhadap permasalahan yang dikemukakan Fazlur Rahman tentang bagaimana bentuk rancangan atau format pemerintahan yang sebenarnya, terutama sumber diperolehnya kekuasaan, dan struktur pemerintahan negara.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian diperpustakaan untuk menghimpun sejumlah buku yang memuat data konsep pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman. Jadi sifat penelitian adalah studi literatur, yakni penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke perpustakaan untuk menggali data yang diperlukan.

¹⁴Alex, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Alfa, t.th), h. 204.

¹⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 208.

¹⁶ *Ibid*, h. 892.

2. Data dan Sumber Data.

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini:

- 1) Biografi Fazlur Rahman, meliputi: kelahiran, pendidikan, pemikiran politiknya dan karya-karyanya.
- 2) Konsep sumber kekuasaan dalam pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman.
- 3) Konsep struktur pemerintahan dalam negara menurut pemikiran Fazlur Rahman.

b. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer
 - a) *Islam*, oleh Fazlur Rahman.
 - b) *Islam and Modernity: Transformation of an Intelelectual Tradition*, oleh Fazlur Rahman.
- 2) Data Sekunder
 - a) *Konsep Negara Islam*", oleh Fazlur Rahman.
 - b) *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Fundamentalis Islam*, oleh Fazlur Rahman, terj. Aam Fahmia.
 - c) *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, oleh Taufik Adnan Amal.
 - d) *Sistem Pemerintahan Islam*, oleh Abdul Qadim Zallum.

- e) “*Pakistan Mencari Identitas Islam*”, dalam John L. Esposito (ed), *Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang*, oleh John L. Esposito, terj. Wardah Hafidz,
- f) *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, oleh Munawir Sjadzali.
- g) *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif dan Historis*, oleh Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim.

3) Bahan Hukum Tertier

- a) *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, oleh Ahmad Warson Munawwir.
- b) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, oleh W.J.S. Poerwadarminta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data digunakan teknik berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mendata dan mengumpulkan sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survei adalah Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
- b. Studi literatur, yaitu dengan melakukan pengkajian dan penelaahan secara intensif terhadap data yang diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik berikut :

- 1) *Editing*, yaitu dengan melakukan pengecekan dan penyeleksian secara selektif terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang valid.
- 2) *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penjelasan atau penafsiran seperlunya terhadap data yang diperoleh dan dirasakan kurang jelas, sehingga lebih memudahkan dimengerti.¹⁷

b. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,¹⁸ yaitu dengan melakukan pengkajian atau penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh tentang konsep pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman dengan berpegang pada landasan teoritis yang disusun, sehingga diperoleh kesimpulannya.¹⁹

5. Tahapan penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap di munaqasahkan, ditempuh tahapan-tahapan berikut :

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet.13, h. 135.

¹⁸Maksudnya ialah analisis secara non statistik sesuai dengan data yang telah dideskripsikan/dipaparkan.

¹⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet.15, h. 40.

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari masalah yang akan diteliti, dan hasilnya akan dituangkan dalam proposal penelitian yang berjudul konsep pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman. Untuk kesempurnaannya dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syari'ah. Setelah disidangkan dan diterima dengan disertai penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu diseminarkan pada hari Senin, 29 Juni 2009.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini terlebih dahulu penulis mengurus surat risetnya dan kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berwenang menanganinya. Selanjutnya melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik kepustakaan dan studi literatur, yang dilakukan selama satu setengah bulan sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin dari tanggal 27 April 2010 sampai 12 Juni 2010.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan secara intensif terhadap data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik *editing* dan *interpretasi*, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, kemudian dilakukan secara kualitatif berdasarkan hukum Islam.

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan sistematika penulisan yang telah disusun. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dengan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan.

G. Kajian Pustaka.

Skripsi yang diangkat ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan (*libarry research*), dengan fokus dan pengakajiannya berpedoman pada buku-buku yang memuat tentang masalah konsep pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman. Literatur utama yang penelitian ini yaitu: *Islam*, oleh Fazlur Rahman, dan *Islam and Modernity: Transformation of an Intelelectual Tradition*, oleh Fazlur Rahman.

Adapun literatur pendukungnya adalah: *Konsep Negara Islam*", oleh Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Fundamental Islam*, oleh Fazlur Rahman, terj. Aam Fahmia, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, oleh Taufik Adnan Amal, "Pakistan Mencari Identitas Islam", dalam John L. Esposito (ed), *Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang*, oleh John L. Esposito, terj. Wardah Hafidz, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, oleh Munawir Sjadzali, *Sistem Pemerintahan Islam*, oleh Abdul Qadim Zallum, dan *Studi*

Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif dan Historis, oleh Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim.

Skripsi mengenai masalah konsep pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman ini belum pernah ada yang mengangkatnya, baik dari segi isi, permasalahannya dan pengkajiannya, dan berbeda judul dan isinya dengan penelitian yang lain.

Mengenai pemerintahan atau kenegaraan ini memang ada yang telah mengangkatnya, yaitu: **Jamaluddin**, Nim.0001133691 yang berjudul: *Penetapan seorang kepala negara menurut Al-Mawardi (Hak legislasi Dewan Perwakilan dalam Islam)*. Kesimpulan isi skripsi ini meneliti tentang permasalahan pengangkatan seorang kepala negara oleh lembaga perwakilan masyarakat. Dalam hal ini al-Mawardi menganggap hak raja atau pemimpin pemerintahan itu dapat dibatasi dan apabila ia tidak mampu menjalankan tugasnya, maka dewan perwakilan dapat mengusulkan untuk menurunkannya dan menggantinya dengan yang baru. Jadi raja atau Perdana Menteri tidak kebal dan ia mempunyai kontrak sosial untuk berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. **Fatimah**, NIM.0001133658 yang berjudul: *Kementerian negara dalam pemerintahan Islam: Studi terhadap pemikiran politik Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sulthaniah*. Kesimpulan isi skripsi ini meneliti tentang permasalahan mengenai jabatan menteri-menteri dalam pemerintahan, seperti menteri koordinator ataupun menteri umum. Mereka mempunyai tugas tersendiri yang langsung langsung dipimpin oleh Perdana Menteri. Sementara Perdana Menteri itu ditunjuk oleh

raja. *Normawati*, NIM.0001133706 yang berjudul: *Pemikiran Imam Al-Mawardi Mengenai Jabatan Gubernur*. Kesimpulan isi skripsi ini meneliti tentang permasalahan kepemimpinan pemerintahan daerah, dimana terdiri dari ada daerah khusus yang pemimpinnya adalah harus orang dari daerah bersangkutan juga, kalau tidak akan menimbulkan konflik dengan pemerintahan pusat, sehingga dapat mengatur daerahnya dengan baik. Daerah ini adalah seperti negeri taklukan perang atau yang menyerah secara damai kepada pemerintahan Islam, atau yang menyatakan bergabung. Daerah lainnya adalah daerah umum, dimana penunjukkan kepala daerahnya adalah langsung oleh kepala negara/raja, jadi perpanjangan tangan langsung oleh raja, karena kepala daerah harus bisa menterjemahkan keinginan pusat

Memperhatikan skripsi-skripsi tersebut, maka jelas sekali berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini, yang fokus permasalahannya pada penekanan konsep pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman, yang meliputi: sumber kekuasaan dalam pemerintahan, dan struktur pemerintahan dalam bernegara. Jadi lebih kepada sumber diperolehnya kekuasaan dan susunan lembaga pemerintahan.

Selain itu, ketertarikan penulis permasalahan ini ternyata yang bersangkutan memang mempunyai pemikiran sendiri tentang pentingnya memahami dengan jelas sumber kekuasaan dalam pemerintahan, dan struktur pemerintahan dalam bernegara, karena akan menentukan kekuatan dan bertahannya suatu negara.

Hal ini tentu kalau diperhatikan lebih jauh, ternyata para pemikir Islam tidak menyentuh persoalan sumber kekuasaan dalam pemerintahan, dan struktur pemerintahan dalam bernegara ini. Bahkan para tokoh lainnya lebih banyak mengemukakan konsep asal-usul negara, pembentukan negara, pengangkatan kepala negara, kepemimpinan dan ketaatan kepada pemimpin. Juga tidak pernah menyinggung bagaimana sebenarnya tentang sumber kekuasaan dalam pemerintahan, dan struktur pemerintahan dalam bernegara, (lihat uraian pada latar belakang masalah).

H. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan latar belakang permasalahan dari penelitian yang terkait dengan masalah konsep pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman. Kemudian dirumuskan permasalahannya dan tujuan penelitian. Selanjutnya dimuat defenisi operasional. Untuk memudahkan pengumpulan dan penggalian data, maka disusunlah metode penilitan, dikemukakan kajian pustaka yang menjelaskan mengenai keaslian penelitian ini dan menguraikan perbedaannya dengan skripsi yang terdahulu, dan sistematika penulisan yang menguraikan skripsi ini sebagai pijakan untuk menyusun secara detail isi dari skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teoritis, yang memuat tentang sumber kekuasaan menurut pemerintahan Islam, terdiri dari: pengertian pemerintahan,

dasar hukum mendirikan pemerintahan dalam Islam, aturan-aturan dalam pemerintahan Islam, mekanisme pengangkatan Kepala Pemerintahan dalam Islam, dan tujuan didirikannya pemerintahan dalam Islam.

Bab III merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama*: data mengenai konsep pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman, terdiri dari: biografi Fazlur Rahman, konsep sumber kekuasaan dalam pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman, dan konsep struktur pemerintahan dalam negara menurut pemikiran Fazlur Rahman. *Kedua*; analisis, yaitu melakukan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian berpedoman pada landasan teoritis yang telah disusun. Analisis ini menelaah konsep pemerintahan menurut pemikiran Fazlur Rahman.

Bab IV merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri dari: simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, dan saran terkait penelitian ini.